

Kemiskinan di Banda Aceh

Poverty in Banda Aceh

Daud Bahransyaf

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)
Kementerian Sosial RI Jl. Kesejahteraan Sosial No 1, Sonosewu, Yogyakarta. Telpon (0274) 377265.
Email: daudbram@gmail.com., HP 081392703955.

Diterima 20 Juli 2016, diperbaiki 7 September 2016, disetujui 16 Januari 2017.

Abstract

Banda Aceh Municipality still has citizens who live in poverty, based on data collection carried out in five districts, namely Syiah Kuala, Banda Raya, Lueng Bata, Ulle Kareng and Baiturrahman. Of 600 heads of household identified as poor, randomly sampled, it could be seen that there were some fundamental socio economic changes in the income, expenditure, as well as the ownership of goods. Income and expenditure of households in a month over Rp 600.000,-. Goods which used to be secondary requirements and owned by middle and upper class society as primary need for life and livelihood could be owned ordinary people, cellphones and motorcycles were mostly owned. TV over 14" and refrigerator were already owned by most respondents. Electricity as a means of lighting and other electrical uses have been utilized by most of the poor families in five districts selected. The electric facility have reached and enjoyed by citizens in the municipality of Banda Aceh. That empirical facts need to be observed and studied further as an input to make adjustments to the areas and criteria of a new definition of poverty for related institutions, central government, local government rule, as well as related minister regulation, specifically the municipality of Banda Aceh.

Keywords: *poverty; urban; Banda Aceh municipality.*

Abstrak

Kota Banda Aceh memiliki warga yang hidup dalam kemiskinan. Pendataan yang dilakukan pada lima kecamatan, Syiah Kuala, Bandar Raya, Lueng Bata, Ulle Kareng dan Baiturrahman terhadap 600 kepala keluarga yang dikategorikan miskin secara acak diketahui terdapat beberapa perubahan sosial ekonomi yang mendasar dalam penghasilan, pengeluaran, dan kepemilikan barang. Penghasilan dan pengeluaran rumah tangga dalam sebulan di atas Rp.600.000,- Kepemilikan barang yang dahulu merupakan kebutuhan sekunder dan dimiliki oleh kalangan masyarakat menengah ke atas, sudah merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan mereka, HP dan sepeda motor kebanyakan dimiliki mereka. TV di atas 14" dan kulkas juga dimiliki sebagian besar responden. Listrik sebagai alat penerangan dan kemanfaatan lain dimanfaatkan oleh sebagian besar responden keluarga miskin di lima kecamatan terpilih. Program listrik telah menjangkau dan dinikmati oleh warga masyarakat di Kota Banda Aceh. Fakta empirik tersebut perlu dicermati dan ditelaah sebagai bahan masukan untuk melakukan penyesuaian kriteria kemiskinan oleh lembaga terkait, termasuk peraturan pemerintah, peraturan menteri, pemerintah daerah, terkait khusus Kota Banda Aceh.

Kata kunci: kemiskinan; perkotaan; Kota Banda Aceh

A. Pendahuluan

Provinsi Aceh terdapat 20 daerah kota dan kabupaten yang didiami delapan kelompok etnis, Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Aneuk Jamee, Kluet, Simeulue, dan Singkil. Semua etnis adalah penduduk asli, memiliki kekhasan tersendiri seperti bahasa, sastra, nyanyian, tarian, musik dan adat istiadat. Kota Banda Aceh adalah salah satu

wilayah yang ada di Provinsi Aceh, memiliki luas 61,36 Km² dengan batas daerah sebelah utara Selat Malaka, sebelah selatan Kabupaten Aceh Besar, sebelah timur Kabupaten Aceh Besar dan sebelah barat Samudera Indonesia. Kota Banda Aceh memiliki sembilan kecamatan, Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan

Ulee kareng, 17 mukim, 70 desa dan 20 kelurahan (gampong). Kecamatan yang terluas Syiah kuala, 14,24 Km² dan kecamatan yang terkecil adalah Jaya Baru, 3,78 Km².

Jarak Kecamatan ke Ibu Kota Banda Aceh terjauh 5 km, jangkauan wilayah Kecamatan dengan kota provinsi relatif dekat, pembinaan, pengawasan dan koordinasi kegiatan program pemerintah daerah relatif mudah penjangkauannya. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, penduduk kota Banda Aceh 249.282 jiwa (penduduk laki-laki 128.333 dan perempuan 120.949), dengan kepadatan penduduk 4.063 per kilometer persegi. Kecamatan Kuta Alam merupakan wilayah yang terbesar penduduknya, 49.503 jiwa, dan Kecamatan Kuta Raja merupakan yang terkecil penduduknya, 12.819 jiwa. Penduduk miskin di Kota banda Aceh terlihat fluktuatif, selama lima, 2009–2013, penduduk miskin 17.270 (2009), 2010 menjadi 20.770, 2011 meningkat menjadi 20.840, 2012 turun menjadi 20.390, dan turun cukup signifikan menjadi 19.420 tahun 2013. Tabel 1 berikut merupakan gambaran penduduk miskin di Kota Banda Aceh.

Ditinjau dari ukuran garis kemiskinan secara rupiah terjadi peningkatan jumlahnya, yakni tahun 2009 tercatat Rp 414.172,- meningkat di tahun 2010 menjadi Rp 435.195,- tahun 2011 menjadi Rp 477.669,- tahun 2012 sebesar Rp 485.543,- dan di tahun 2013 menjadi Rp 493.588,-. Peningkatan ukuran garis kemiskinan secara rupiah karena beberapa faktor dari ekonomi makro di Kota Banda Aceh, seperti nilai inflasi, kurs, daya beli masyarakat, peningkatan harga kebutuhan pokok. Fluktuasi ukuran kemiskinan tersebut meningkat setiap tahunnya, pemenuhan kebutuhan fisik minimum masyarakat

meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi dan sosial wilayah atau daerah setempat. Hal ini sejalan dengan pengeluaran per kapita tahun 2009 sebesar Rp 630,63,- terus meningkat Rp 640,06,- tahun 2012, dan Rp 643,83 tahun 2013.

Kondisi tersebut sepaham dengan pandangan Andre Harsono (VOA 2016), seorang peneliti dari *Human Right Watch*, menilai perubahan besar di Aceh 10 tahun setelah peristiwa tsunami masih menyisakan pekerjaan rumah berupa kemiskinan dan kerusakan lingkungan. “Infrastruktur di Aceh bagus sekali, jalan, jembatan, kota bahkan taman berkembang dengan baik. Airportnya juga bagus, tetapi dari segi kemiskinan Provinsi Aceh masih salah satu yang termiskin di Indonesia (ranking keenam) sehingga cukup menyedihkan”. Pandangan dari Muslahuddin Daud (dalam Ranny Virginia Utami CNN Indonesia, 2014), pengamat pembangunan Aceh, mengemukakan “pembangunan di Aceh pascatsunami secara fisik memang bagus, tetapi pembangunan tersebut dirasa sia-sia karena tidak diselaraskan dengan pembangunan reguler.” Muslahuddin menilai ada beberapa faktor yang membuat pembangunan di Aceh dinilai tidak maksimal dan hanya bagus secara fisik.

Faktor pertama, menurut Muslahuddin adalah dari segi dana yang masuk untuk pembangunan Aceh sebesar 80 triliun, sementara yang dibutuhkan untuk proyek rekonstruksi pascabencana hanya 50 triliun. Jumlah dana yang lebih besar ini membuat pembangunan di Aceh menjadi sangat bagus, tetapi hanya secara fisik, misalnya pembangunan jalan-jalan besar, perumahan, pelabuhan dan perbaikan bandara. Faktor kedua adalah masalah penyerahan aset-aset yang sudah dibangun dan diperbaiki oleh Badan Rehabilitasi

Tabel 1
Penduduk Miskin di Kota Banda Aceh

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Penduduk Miskin	17.270	20.770	20.840	20.390	19.420
2	Penduduk Miskin	8.64 %	9.19 %	9.08 %	8.65 %	8.03 %
3	Garis Kemiskinan	Rp 414.172,-	Rp 435.195,-	Rp 477.669,-	Rp 485.543,-	Rp 493.588,-

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh

dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias. BRR Aceh-Nias, badan khusus bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bergerak menjadi pusat keluar masuk dana-dana dari berbagai pihak. Dana berasal dari APBN, negara atau lembaga donor baik multilateral maupun bilateral, Palang Merah Indonesia, nasional dan internasional, termasuk dari dunia usaha. Total 900 lembaga dengan sekitar US\$ 7,2 miliar. Dari jumlah itu, dua per tiga bantuan dari luar negeri. Setelah lebih dari lima tahun berdiri, pada 2009 BRR menyelesaikan tugas. Dengan alokasi dana sekitar US\$6,7 juta, setidaknya terbangun lebih 140.000 rumah, 1.759 sekolah, 363 jembatan dan 13 airport.

Namun menurutnya, sejumlah asset tersebut tidak dirawat oleh pemerintah lokal, sehingga tidak berfungsi dengan baik, tidak selaras dengan pembangunan regular. “Misalnya, program dari UNDP untuk pembuangan sampah air, sudah dibangun tetapi tidak dipakai,” ujar Muslahuddin memberikan contoh.

Muslahuddin juga menyoroti iklim investasi di Aceh yang dinilai kurang bersahabat karena permasalahan stabilitas daerah. Aksi kekerasan dan mentalitas keberpihakan oleh pejabat daerah setempat, kerap menghambat masuknya investasi di Aceh, yang masuk ke Aceh harus bayar ke beberapa pihak,” ujar Muslahuddin. Ada 170 kesepakatan investasi yang saya ketahui masuk ke Aceh tetapi gagal, hanya 3 atau 4 yang berhasil,” ujar Muslahuddin menambahkan. Ada ketidaksambungan antara rekonstruksi pascatsunami dengan pembangunan normal, rekonstruksi tidak terlalu mendorong perekonomian di Aceh. Pebisnis tidak melihat Aceh sebagai peluang yang menarik karena mereka belum melihat adanya stabilitas. Aceh masih mengimpor ekonomi, barang keluar Aceh jumlahnya tidak signifikan.

Beberapa hal yang dipandang berkontribusi, warga Aceh termanjakan dengan bantuan, di level pemerintah yang nyatanya tidak berfungsi sebagai fasilitator. Ia bahkan menuturkan, investasi yang kurang maju di Aceh ada hubung-

annya dengan penerapan hukum syariah, pengusaha besar berpikir ulang untuk masuk ke Aceh karena banyaknya batasan dalam hukum syariah. Rekonstruksi tidak terlalu mendorong perekonomian di Aceh, pebisnis tidak melihat Aceh sebagai peluang yang menarik karena mereka belum melihat adanya stabilitas.

Pandangan berikut datang dari Kuntoro (dalam Nurina Savitri, 2014), BRR pimpinan Kuntoro telah menjalankan anggaran 7,2 milyar dollar, program kemanusiaan terbesar dalam sejarah. Namun anggaran besar itu ternyata dinilai tidak mampu mendongkrak perekonomian Aceh. “Belum ada investasi besar di Aceh yang masuk, belum ada kebun baru, pertambangan baru,” ujar Profesor Kuntoro. Aceh masih mengimpor ekonomi, barang ke luar Aceh jumlahnya tidak signifikan. Dalam sebuah forum jurnalis asing di Jakarta, ia mengungkapkan salah satu penyelesaiannya purnatugas BRR. Beliau menyesalkan, yang saya bangun di Aceh, sistem yang saya tinggalkan, mereka tidak lagi menggunakannya. Saya menyesal tidak memberi mereka pemahaman terhadap sistem itu, sistem yang bisa membantu mereka untuk berkembang lebih jauh, ungkapnyanya. Pembangunan ekonomi yang berjalan lambat di Aceh justru berpangkal dari program pemulihan pascabencana sendiri. Kuntoro menambahkan, yang terjadi di Aceh adalah sebuah proses normal pascakonflik berdarah, paling tidak dibutuhkan waktu 10 tahun untuk belajar memerintah dengan baik. Kuntoro dan Muslahuddin mencontohkan, sektor pariwisata sebagai bidang yang paling terdampak akibat penerapan hukum syariah, walaupun potensi konflik berdarah seperti era sebelum perdamaian diperkirakan tidak akan kembali.

Sydney Jones, Direktur Institut Analisa Kebijakan Konflik, peneliti terorisme di Asia Tenggara, pada forum “10 Tahun Tsunami” mengutarakan, “Kemungkinan untuk kembali ke situasi konflik sangat kecil, karena kelompok GAM sangat mahir memainkan peran mereka dalam politik Aceh. Setidaknya saya tidak melihat adanya potensi konflik dalam jangka pendek

maupun menengah.” Pandangan beberapa narasumber di atas menggambarkan kondisi yang ditemui di Provinsi Aceh secara umum dan Kota Banda Aceh secara khusus, baik terhadap investasi maupun sektor perekonomian lainnya, seperti sektor pariwisata berjalan lambat. Provinsi NAD memiliki otonomi khusus untuk melaksanakan syariat Islam yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

Otonomi tersebut mencakup ketentuan pelaksanaan syariat Islam yang kemudian secara khusus diatur dengan Qanun Aceh, Kota Banda Aceh harus mengikuti aturan tersebut. Menurut Illiza, sebagai kota, tentu Banda Aceh memiliki kewenangan dalam penerapan syariat Islam. Proses rekonstruksi pascabencana menghasilkan kondisi yang lebih baik daripada kondisi sebelum bencana, berbagai kemajuan telah dicapai. Indikasinya, menurunnya persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun. Pada 2012 penduduk miskin Kota Banda Aceh mencapai 8,65 persen dan pada 2013 turun menjadi 8,03 persen yang berarti berkurang 0,62 persen dari tahun sebelumnya.

Indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Banda Aceh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, 2009 sebesar 77 menjadi 79 tahun 2013, dapat dilihat dari alokasi anggaran APBD Kota Aceh. Persentase penganggaran belanja publik dinaikan, yang sebelumnya 35,80 persen 2010, menjadi 46,87 persen 2014. Komposisi belanja publik dengan belanja aparatur negara cukup berimbang (Walikota Illiza Banda Aceh, Jawa Post 2015). Angka harapan hidup (*life expectancy rate*), juga mengalami peningkatan secara signifikan, tahun 2009 mencapai 70,56 tahun, 2012 mencapai 71,42 tahun, dan 2013 menjadi 71,72 tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini sejalan dengan semakin sejahteranya masyarakat secara sosial ekonomi, sehingga kebutuhan gizi, protein, nutrisi dan pendukung kesehatan terpenuhi atau terjangkau oleh masyarakat kebanyakan di kota Banda Aceh.

Kota Banda Aceh pascatsunami 2004 sampai 2016, memiliki kemajuan sangat pesat dari segala aspek. Melalui pengamatan parsial yang dilakukan, bulan November dan Desember 2015 lalu, Kota Banda Aceh sudah terlengkapi sarana, prasarana dan infrastruktur, baik secara sosial, ekonomi dan teknologi. Ketersediaan kebutuhan primer dan sekunder juga secara sosial, ekonomi dan teknologi sudah terpenuhi, wifi tersedia dan terjangkau dari segala penjuru sudut kota, bahkan hampir semua warung kopi dan mie menyediakan Wifi. Warga kota Banda Aceh yang memiliki laptop dan HP android dapat menikmati jendela informasi secara nasional dan internasional, tetapi masih ada sebagian warga masyarakatnya yang miskin. Kondisi tersebut yang mendorong dilakukannya penelitian.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan (Istiana Hermawati dkk, 2015), yaitu penggabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif (*mix methods*). Penggabungan beberapa metodologi ini menurut terminologi sebelumnya disebut ‘*triangulasi*’. *Triangulasi* ini oleh Denzin (1970) dikembangkan tidak sekedar penggabungan metode dan data saja, melainkan juga penggabungan peneliti dan teori-teorinya. Denzin memandang, bahwa penggabungan strategi penelitian memperkuat klaim yang menyangkut kesahihan kesimpulan yang dapat dicapai melalui data. Menurutnya, asumsi bahwa data yang diperoleh dari pendekatan yang diasumsikan berfokus pada masalah penelitian yang sama, konsisten dan terintegrasi dengan data yang lain. Sebaliknya, data yang berbeda tidak diharapkan konsisten tetapi data itu dipandang saling melengkapi.

Kedua pendekatan digunakan dan diberikan kedudukan yang setara, secara simultan atau saling bertalian sejak masa survai lapangan, masa analisis data maupun dalam penulisan laporan akhir. Pada saat survei lapangan, data ditekankan pada deskripsi objektif dan penjelasan statistis tentang kondisi kemiskinan di lapangan. Data

diperoleh dengan teknik observasi dan telaah dokumen, sehingga diperoleh gambaran umum tentang masalah kemiskinan yang terjadi, baik secara koseptual maupun empiris. Teknik ini didukung dengan wawancara, sehingga dapat digali informasi yang sangat spesifik. Dalam penelitian ini komponen kuantitatif dan kualitatif saling berproses dan memiliki bobot yang seimbang. Kedua pendekatan menuju pada pertanyaan-pertanyaan yang berbeda tetapi saling berhubungan sehingga kedua jenis data yang dihasilkan dapat saling melengkapi. Pendekatan *mix method* berupaya memadukan dua pendekatan dan data (kuantitatif dan kualitatif), sehingga diperoleh data komprehensif.

Populasi penelitian ini seluruh keluarga fakir miskin yang teregister (penerima layanan program pemerintah seperti Raskin, Kartu Indonesia Sejahtera/KIS, Kartu Indonesia Sehat/KIS, Kartu Indonesia Pintar/KIP, Jamkesda, dan sebagainya), dan yang tidak teregister. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian adalah teknik *multi stage cluster random sampling* (di tentukan 5 Kecamatan sebagai sampel penelitian). Setiap Kecamatan dilibatkan 6 petugas pengumpul data dan masing-masing petugas akan mengumpulkan data dengan melibatkan 20 responden (keluarga miskin), dengan catatan 18 orang adalah responden yang teregister dan 2 responden yang tidak teregister. Dengan demikian Kota Banda Aceh ditetapkan 600 responden (540 responden teregister dan 60 responden tidak teregister). Responden ditentukan secara random. Responden pejabat pemerintah daerah yang secara fungsional terkait dengan kemiskinan secara *purposive* berjumlah 12 orang, untuk mengetahui pandangannya tentang kemiskinan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya dalam menangani masalah kemiskinan di wilayah kecamatan yang ditetapkan. Analisis data berupa hitungan persentase dan narasi (kualitatif) sesuai dengan rancangan penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, Provinsi NAD. Sunyoto Usman (2015), mengemukakan bahwa pembahasan masalah kemiskin-

an harus memperhatikan *community setting* (lokasi). *Community setting* bisa dikategorikan berdasarkan wilayah, sektor, dan modernitas. Kategori wilayah memperhatikan wilayah administratif desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, wilayah geografis misalnya *upland/lowland* atau pesisir/pedalaman, dan wilayah demografis misalnya padat penduduk dan jarang penduduk, wilayah administrasi perkotaan dan perdesaan. Dalam penelitian ini setiap provinsi diambil 1 sampel kota sebagai representasi wilayah perkotaan, yakni Kota Banda Aceh dan ditetapkan 5 kecamatan sebagai sampel penelitian yaitu Kecamatan Syiah Kuala, Bandar Raya, Lueng Bata, Ulle Kareng, dan Baiturrahman.

C. Kemiskinan di Kota Banda Aceh

Masalah Sosial: Abdul Ghani Salleh (2005), mahasiswa Malaysia yang peduli dengan Aceh dalam tulisannya Perencanaan Kota Pasca Gempa Bumi dan Tsunami berkesimpulan, bahwa isu dan masalah akibat bencana tsunami di Banda Aceh perlu dibangun segera untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh penduduknya. Di Kota Banda Aceh masih ditemui warga masyarakat yang kurang beruntung (miskin). Berdasarkan data yang dilansir oleh BPS kota Banda Aceh, terdapat warga masyarakat yang hidup dalam kemiskinan di tengah gencarnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Data yang diperoleh dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), mengungkapkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Banda Aceh dapat dideskripsikan dalam tabel 2.

Kondisi penyebabnya diperkirakan akibat bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di tahun 2004. Faktor kemiskinan banyak disebabkan kehilangan rumah, lahan usaha, lahan pertanian atau ladang, dan binatang ternak yang mengakibatkan kehilangan sumber mata pencaharian penopang hidupnya. Implikasinya pada keluarga rentan dan anak yatim piatu akibat bencana tsunami. Kondisi ini juga dimungkinkan

berimbas pada lanjut usia terlantar, karena mereka kehilangan harta benda berharga penopang hidup mereka sehari-hari. Hal ini juga diprediksi dialami oleh disabilitas, 498 orang, termasuk perempuan rawan sosial ekonomi, 764 orang yang kehilangan suami akibat bencana tsunami, sehingga penopang keluarga hilang.

Tabel 2
PMKS Kota Banda Aceh

No	Jenis PMKS	Jumlah
1	Anak Dengan Kecacatan	56
2	Anak yatim/piatu/yatim piatu	1.424
3	Anak terlantar	13
4	Anak bermasalah dengan hukum	1
5	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	764
6	Lanjut usia terlantar	4.185
7	Penyandang disabilitas	498
8	Pengemis	15
9	Gelandangan	1
10	Bekas warga binaan lembaga	28
11	pemasyarakatan	14
12	Korban penyalahgunaan NAPZA	18.121
13	Fakir Miskin	60
14	Rumah tidak layak huni	1.780
15	Keluarga rentan	10
16	Keluarga bermasalah sosia psikologi Pemulung	8

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh 2015

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Banda Aceh, tahun 2014 adalah Karang Taruna (KT), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Orsos, Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan Panti Sosial. Di tiap kecamatan di Kota Banda Aceh telah dibentuk suatu wadah yang dikenal dengan “Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial” (Puspelkesos), yang terdiri tenaga pendamping program Kemensos, seperti pendamping PKH, TKSK, pendamping Kube. PSKS yang tersebar di wilayah Kecamatan, dibantu oleh Puspelkesos yang dibentuk oleh Dinas Sosial dan Tenaga kerja dengan tugas utama membantu dinas sosial dan tenaga kerja termasuk instansi terkait dalam menangani dan mengatasi masalah sosial, termasuk masalah kemiskinan.

Pandangan tentang Kemiskinan dan Upaya Mengatasinya: Ukuran kemiskinan berdasarkan BPS, seorang disebut miskin apabila memperoleh 2100 kalori per hari. Sayogyo mengukur dengan 1 kg beras per hari, sedang World Bank \$ 1 per hari. Ada lima teori kemiskinan (Suradi Mzq, 2013), adanya perbedaan teori-teori kemiskinan, mengelompokkan teori-teori tersebut dalam kelompok yang berbeda-beda (bandingkan Blank, 2003; Goldsmith dan Blokely, 1992; Jennings dan Kushnick, 1999; Rodgers, 2000; Schiller, 1989; Shaw 1996).

Teori-teori tentang penyebab kemiskinan berasal dari kelemahan individu dan fenomena sosial (liberal atau progresif). Ryan (1976) menunjuk perbedaan tersebut sebagai, kemiskinan yang timbul akibat dari kesalahan mereka sendiri. Gold Smith dan Blakely, membedakan kemiskinan sebagai penyakit dengan kemiskinan yang timbul akibat ketidaksengajaan, kecelakaan, dan kemiskinan sebagai sebuah struktur. Schiller (1989: 2-3) menjelaskan dalam istilah karakter-karakter merusak yang dimiliki, kesempatan yang terbatas dan timbulnya KKN. Jennings (1999), meninjau varian-varian individual dengan konsepsi sosial, memberi tekanan pada perkembangan sosial dan politik. Pendapat Rank (2004: 50), bahwa atribut yang dimiliki individu sebagai penyebab kemiskinan adalah salah alamat. Kegagalan struktural dalam sistem politik, ekonomi, sosial adalah penyebab yang lebih nyata.

Macam kemiskinan secara ringkas dibedakan, kemiskinan individu, teori pertama ini menjelaskan bahwa individu bertanggung jawab atas kemiskinan yang dialaminya. Kemiskinan Struktural, akar teori kedua kemiskinan ini sendiri menyebabkan “kultur Kemiskinan”. Teori ini menyarankan bahwa kemiskinan diciptakan oleh transmisi antargenerasi dari kumpulan kepercayaan, nilai dan keterampilan sosial tetapi dilakukan individual. Individu tidak perlu diper-salahkan karena mereka korban dari disfungsi subkultural dan kultur mereka sendiri (Oscar Lewis, dalam *Scientific American*, Oktober 1966

dikutip dalam Ryan, 1976:120), mendefinisikan kultur kemiskinan sebagai kumpulan kepercayaan dan nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Kemiskinan Struktur Politik dan Ekonomi, dalam teori ini kemiskinan tidak pada individu sebagai sumber kemiskinan, tetapi dari sisi ekonomi, politik dan sistem sosial yang menyebabkan seseorang mempunyai kesempatan terbatas terhadap sumber-sumber untuk memperoleh pendapatan yang layak. Kemiskinan Geografi, kemiskinan di daerah pedesaan, kemiskinan *geto*, daerah yang tidak mempunyai investasi, kemiskinan di daerah selatan, kemiskinan di dunia ketiga, dan perbedaan lain yang diwujudkan dengan karakteristik kemiskinan yang timbul secara terpisah dari teori-teori yang lain. Teori regional menekankan fakta bahwa orang, institusi dan kebudayaan di daerah tertentu menimbulkan kekurangan sumber daya objektif.

Kemiskinan Akumulatif, lebih kompleks dan pada beberapa tingkat membangun komponen dari setiap teori-teori lain yang akan terlihat oleh individu dan komunitas mereka sebagai pilihan kesempatan dan masalah, dan suatu masalah yang mendominasi menutup kesempatan lain dan membentuk kumpulan masalah membuat respons efektif yang hampir tidak mungkin terjadi (Bradshaw, 2000), situasi individu dan sumber-sumber komunitas sebagai ketergantungan secara mutual dengan ekonomi yang labil, sebagai contoh menciptakan individu-individu yang kurang memiliki sumber daya untuk berpartisipasi dalam ekonomi, membuat keberlangsungan ekonomi menjadi lebih sulit bagi komunitas yang membayar pajaknya lebih sedikit. Kondisi kemiskinan (Fajar Weiz, 2011), ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan terjadi, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan.

Kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya alam (SDA) yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan diakibatkan oleh imbas dari birokrat kurang berkompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga

mengakibatkan susahnyanya keluar dari kemelut kemiskinan. Dampaknya, para ekonom selalu gencar mengkritik kebijakan pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ketimbang pemerataan.

Kemiskinan menurut ahli seperti Zygmunt Bauman (1998:1), seperti yang dikutip Fajar Weiz, merinci setidaknya terdapat 3 pendekatan dalam mendefinisikan kemiskinan.

Kemiskinan yang mendeskripsikan sebagai kekurangan *material need*. Kemiskinan, didefinisikan sebagai kondisi seseorang atau sebuah komunitas kekurangan esensial untuk memenuhi standar kehidupan minimum yang terdiri dari sandang, pangan, papan (sumberdaya material). Kemiskinan yang dideskripsikan dari aspek hubungan dan kebutuhan sosial, seperti *social exclusion* (pengucilan sosial), ketergantungan, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat, termasuk pendidikan dan informasi. Kemiskinan yang dideskripsikan sebagai kurangnya pendapatan dan kemakmuran yang ditetapkan berdasarkan indikator-indikator tertentu. Dari sinilah munculnya pemilahan kemiskinan secara global berdasarkan pendapatan harian keluarga, yaitu kurang dari \$1 atau \$2 sehari.

Indikator Kemiskinan menurut BPS antara lain sebagai berikut. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan); Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi air bersih dan transportasi); Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga); Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massa; Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam; Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat; Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan; Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental. Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dasar dan pekerjaan. Mubyarto (1997) mengemukakan, bahwa kemiskinan terjadi karena orang miskin tidak memiliki akses sebagai sumber pendapatan, juga karena struktur sosial ekonomi tidak membuka peluang bagi orang miskin ke luar dari lingkungan kemiskinan yang tidak berujung pangkal. Kemiskinan seperti digambarkan World Bank memiliki cakupan yang lebih luas, karena terminologi yang digunakan adalah kesejahteraan. Dalam konteks ini, orang dikatakan miskin tidak terbatas pada ketidakmampuannya secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum sebagaimana dirumuskan dalam pandangan konvensional, tetapi juga dipengaruhi oleh dimensi lain, seperti kapabilitas individu yang rendah dan ketidakberfungsian sosial. Kemiskinan menurut BPS dan Depsos RI (2003:11) dapat dimaknai sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (*inability of the individual to meet basic needs*).

Konsep tersebut sejalan dengan Sen Meier (1989) yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah *the failure to have certain minimum capabilities*, mengacu pada standar kemampuan minimal tertentu, berarti penduduk yang tidak mampu melebihi kemampuan minimum tersebut dianggap miskin. Perhitungan penduduk miskin di Indonesia mengikuti konsep ini, artinya penduduk yang secara pendapatan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar minimal dianggap miskin. Pendapatan merupakan aspek penting dari kemiskinan, tetapi pendapatan hanya mampu menggambarkan sebagian kehidupan manusia yang multidimensional. Kemiskinan dengan satu dimensi ekonomi semata, tampaknya kurang memadai untuk menggambarkan realitas kemiskinan yang sebenarnya.

Pandangan tersebut terlalu sempit karena masalah kemiskinan tidak sebatas masalah material saja, tetapi berasal dari berbagai hal, mulai dari ketidakadilan distribusi pendapatan,

ketimpangan pendidikan, sosial, ketidakadilan hukum, ketidakmerataan asset, baik antarwilayah maupun daerah. BPS (2006: 5-7) membagi kemiskinan menjadi dua, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif didasarkan pada ketidakmampuan seseorang untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat, sehingga proses penentuannya sangat subyektif.

Mereka yang berada di bawah standar penilaian tersebut dikategorikan miskin secara relatif, sedangkan kemiskinan absolute ditentukan berdasarkan ketidakmampuan seseorang dalam mencukupi kebutuhan pokok minimum, diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum tersebut dikenal dengan istilah "gariskemiskinan". Garis kemiskinan absolut tidak berubah dalam hal standar hidup, dan mampu membandingkan kemiskinan secara umum.

Berdasarkan Kepmensos RI No 146/HUK/2013, tentang kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu, sasaran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional ada 11 kriteria: Pertama, mata pencaharian/pendapatan, (Tidak mempunyai sumber pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kedua, jenis pengeluaran (mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana). Ketiga, Pemenuhan kebutuhan kesehatan (Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah). Keempat, pemenuhan kebutuhan sandang (Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga). Kelima, pemenuhan kebutuhan pendidikan (Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama).

Keenam, kondisi dinding rumah (terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik, berlumut atau tembok tidak diplester), Ketujuh, kondisi lantai tempat tinggal (terbuat dari tanah

atau kayu/semén/keramik dengan kondisi tidak baik dan kualitas rendah). Kedelapan, kondisi atap rumah (dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak layak). Kesembilan, penerangan rumah (mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran). Kesepuluh, luas lantai rumah (kurang dari 8 m² per orang). Kesebelas, sumber air minum (berasal dari sumur atau mata air tidak terlindungi/air sungai/air hujan).

Memahami kriteria kemiskinan, salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan dimaksud, diperlukan tindakan nyata yakni melalui program pembangunan, yang ditekankan pada pembangunan sosial tentunya tidak mengabaikan pembangunan ekonomi dan teknologi. Pembangunan sosial (Paulus Wirotomo, 2013), tidak boleh bersifat deterministik, tetapi harus membuka kesempatan bagi *public negotiation* (inovasi demokratisasi dan ruang sosial semi otonom). Dalam rangka pembangunan sosial harus diciptakan ruang publik tempat warga masyarakat dapat mengekspresikan kepentingan dan kebutuhan mereka.

Organisasi di dalam masyarakat yang benar-benar berbasis pada masyarakat perlu memperoleh tempat dalam proses perencanaan (pengembangan *sociability*). Pendekatan pembangunan sosial perlu menghilangkan sifat hubungan manusia yang hanya berdimensi “materialistik”, pandangan yang hanya satu dimensi (*one dimensional*) sering mereduksi manusia menjadi “materi” atau “objek” yang tidak memiliki makna subyektif dan mampu melakukan komunikasi dan interaksi yang produktif. Individu sebagai aktor yang memiliki kemampuan menginterpretasi situasi dengan “makna subyektif” harus tetap mendapat tempat sebagai subyek dalam proses pembangunan yang menyangkut dirinya. Keputusan pembangunan harus bersifat dialogis dan negotiable (*social order is a negotiated order*).

Gunawan Sumodiningrat (2005), gagalnya konsep kebijakan pembangunan di masa lalu, membuktikan bahwa salah satu syarat penting untuk mencapai keberhasilan pembangunan

bukan semata-mata karena baiknya strategi dan implementasi kebijakan pembangunan, tetapi keberhasilan pembangunan didukung peranserta rakyat karena kebijakan yang diterapkan dirasakan masih sentralistik dan tidak memberdayakan serta masih menganggap masyarakat sebagai obyek dari pembangunan. Pola pembangunan yang ditawarkan adalah pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dan pemerintah sebagai fasilitator, lebih dikenal dengan strategi pemberdayaan masyarakat.

Partisipatif aktif masyarakat dalam pelaksanaan program memerlukan kesadaran akan minat dan kepentingan bersama (Brithe Mikkelsen: 2001), yang dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui dua cara: Pertama, meningkatkan produktivitas masyarakat guna meningkatkan pendapatannya; Kedua, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Penyebab kemiskinan dilihat dari sudut pandang politik, karena tidak adanya partisipasi masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka. Dilihat dari sudut pandang sosial, masyarakat miskin tidak terintegrasi dalam institusi sosial formal dan internalisasi dalam budaya kemiskinan. Dari sudut ekonomi, masyarakat miskin ditandai dengan rendahnya penghasilan. Dilihat dari sudut pandang aset, masyarakat miskin rendah kepemilikan terhadap barang modal yang dapat menjadi aset (harta) mereka. (<http://www.depkominfo.go.id/berita/bipnewsroom/2009>).

Orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan memiliki ciri-ciri (Munandar, S.1986 dalam Daud Bahransyaf, dkk, 2011) sebagai berikut. Tidak memiliki faktor produktif sendiri seperti tanah, modal, keterampilan dan sebagainya. Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, seperti untuk memperoleh tanah garapan atau modal usaha. Tingkat pendidikan mereka rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar, oleh karena itu harus membantu orangtua mencari tambahan

penghasilan. Kebanyakan tinggal di desa sebagai pekerja sawah, berusaha apa saja. Banyak yang hidup di kota berusia muda dan tidak memiliki keterampilan. Dalam upaya penanganan kemiskinan penting mengetahui kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Kota Banda Aceh dalam kebijakan penanganan masalah kemiskinan.

Penanganan Masalah Kemiskinan Kota Banda Aceh: Keluarga miskin di Kota Banda Aceh di peroleh dari lima kecamatan terpilih, yaitu Syiah Kuala, Bandar Raya, Lueng Bata, Ulle Kareng dan Baiturrahman, berjumlah 600 orang dan masing-masing kecamatan ditetapkan dan dipilih 120 keluarga miskin sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh dinas terkait. Responden terdiri dari 74.50 persen (447) laki-laki dan 25.50 persen (153) perempuan. Responden berstatus kawin (71.67 persen), cerai mati 20.17 persen, cerai hidup 5.67 persen dan belum kawin 2.50 persen. Ditinjau dari aspek pendidikan, dapat dilihat dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3
Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan

No	Pendidikan Terakhir	F	%
1	Tidak sekolah	26	4.33
2	Belum/Tidak Tamat SD/Sederajat	60	10.00
3	SD/MI/Sederajat	138	23.00
4	SMP/MTs/Sederajat	131	21.83
5	SMA/SMK/MA/Sederajat	235	39.17
6	Diploma I/II	1	0.17
7	Diploma III/Sarjana Muda	5	0.83
8	Diploma IV/S1	3	0.50
9	S2/S3	1	0.17
Jumlah		600	100

Sumber: Hasil wawancara (N: 600)

Ditinjau dari jenis pekerjaan responden, cukup bervariasi. Jenis pekerjaan utama adalah buruh tidak tetap non pertanian, yaitu 32.50 persen dan usaha sendiri 23.33 persen. Pekerjaan sampingan, sebagian besar (83.17 persen) mengaku tidak memiliki, hanya sebagian kecil, yakni usaha sendiri (7.00 persen), buruh tidak

tetap non-pertanian (3.33 persen) dan pekerjaan sampingan lainnya (3.50 persen). Responden berdomisili pada daerah pertanian dan pesisir pantai/sungai, selain sebagai buruh sebagian sebagai nelayan. Responden lain memang tidak memiliki pekerjaan tetap (termasuk pekerjaan sampingan), artinya bekerja serabutan yang bisa mendatangkan hasil uang, yang domisili di daerah perkotaan, tidak memiliki keterampilan yang dapat menunjang kehidupan keluarganya, menjadikan mereka penduduk kurang mampu yang hidup di daerah perkotaan.

Penelusuran mengenai kehidupan responden di kategorikan kurang mampu, mengacu pada keputusan Menteri Sosial RI Nomor 46/HUK/2013, tentang Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, dengan 11 kriteria tidak dapat dijadikan patokan untuk menentukan responden fakir miskin. Khusus untuk kota Banda Aceh tidak mudah menetapkan kriteria tersebut, karena pascatsunami 2004 apabila memperhatikan secara fisik rumah, tidak dapat dijadikan ukuran bahwa keluarga tersebut kurang mampu. Hal ini disebabkan banyak dari mereka yang memperoleh bantuan perumahan (perbaikan) dari lembaga atau NGO (*Non Government Organisation*) baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dari pemerintah (pusat dan daerah) dan pengusaha nasional.

Tampilan fisik rumah umumnya ukuran 36, dan permanen dengan desain dan arsitektur yang baik (seperti minimalis dengan tampilan warna dan bentuk yang menarik). Namun apabila ditelusuri lebih detail ke dalam rumah tampak mereka merupakan keluarga kurang mampu, apabila disetarakan dengan penduduk sekitarnya yang mampu. Umumnya responden memiliki perabot rumah tangga yang sudah lama (bangku tamu, meja makan, lemari pajangan) dan kusam, beberapa responden tidak memilikinya sehingga duduk ditikar. Responden miskin di Kota Banda Aceh memiliki HP (*hand phone*), televisi diatas 14” dan kulkas, yang dalam kriteria kemiskinan, kepemilikan tersebut tidak ada. Keluarga miskin yang dijadikan responden memiliki barang elek-

tronik dan motor. Artinya alat komunikasi HP sudah bukan barang sekunder, tapi sudah merupakan kebutuhan primer untuk berkomunikasi.

Televisi, kulkas, dan kepemilikan motor sudah pula merupakan kebutuhan primer. Motor sudah merupakan alat transportasi utama, karena angkot sulit menjangkau wilayah tempat tinggalnya. Ditinjau dari biaya transportasi, motor lebih murah, dengan dana satu atau dua liter bensin (setara dengan Rp 15.000,-), responden dapat menjangkau daerah yang jauh, baik untuk bekerja dan berusaha maupun kegiatan lainnya, sendiri atau berdua (berboncengan). Pemilikan HP berdasarkan pengamatan parsial dan pengakuan responden, bukan yang baru (HP bekas pakai) dan merupakan HP biasa, belum berfitur Android, bahkan HP tersebut merupakan pemberian anaknya, sebagai sarana komunikasi dengan orang tuanya karena mereka bekerja di luar kota.

TV, kulkas, juga sepeda motor, kebanyakan berupa sepeda motor tua (tahun 80 an) yang mereka beli dengan murah (Rp 1.500.000 -). Beberapa di antara sepeda motor yang dimiliki responden diangsur pembeliannya, ada anaknya yang mengangsurkan atau responden sendiri. Kondisi perekomominan keluarga responden, dapat diinformasikan, bahwa penghasilan per bulan pada umumnya di atas Rp 600.000,- sampai Rp 2.400.000,- per bulan. Penghasilan Rp 601.000,- – Rp 1.200.000,- 23.83 persen, penghasilan Rp 1.201.000,- – Rp 1.800.000,- 32 persen dan penghasilan Rp 1.801.000,- – Rp 2.400.000,- 21.33 persen, yang berpenghasilan di atas Rp.3000.000,-per bulan 9.17 persen.

Ditinjau dari pengeluaran keluarga responden dalam satu bulan, terlihat signifikan dengan penghasilan yang mereka peroleh, terlihat dari pengeluaran responden antara Rp 601.000,- – Rp 1.200.000,- 45,33 persen untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga (kebutuhan makan dan minum), dan pengeluaran antara Rp 1.201.000,- – Rp 1.800.000,- 35,67 persen dan Rp 1.801.000,- – Rp 2.400.000,- 19 persen. Pengeluaran non konsumsi terbesar antara Rp

601.000,- – Rp 1.200.000,- yakni 71.33 persen. Pengeluaran non konsumsi untuk transportasi, tagihan listrik, tagihan air (PAM), pembelian pulsa HP.

Rumah yang dihuni oleh responden dan keluarganya umumnya permanen dan semi permanen, dengan ukuran luas rumah sebagian besar di atas 36 m². Pascatsunami responden memperoleh bantuan rumah, status kepemilikan rumah 70.50 persen milik sendiri, yang status kepemilikannya bebas sewa/menumpang 18.50 persen, dan kontrak/sewa 10.67 persen. Data yang terkumpul mengenai status kepemilikan tanah signifikan dengan kepemilikan rumah, 67.85 persen milik sendiri, 21.00 persen bebas sewa/menumpang, dan 10.67 persen kontrak/sewa, dan status lainnya 0.50 persen.

Dinding terluas berupa tembok tanpa plester/kayu berkualitas rendah/seng 65.33 persen, dinding tembok di plester/kayu berkualitas tinggi dimiliki 28.00 persen responden, sisanya bambu dan bahan lainnya. Jenis dinding yang plester atau kayu kualitas baik, merupakan rumah hasil renovasi pasca tsunami. Kayu kualitas rendah pada umumnya dari triplek, menurut informasi lapangan beberapa di antaranya bantuan lembaga dan masyarakat yang peduli, termasuk famili yang ikut membantu merenovasinya pascatsunami. Lantai terluas yang digunakan di rumah responden hampir seluruhnya 84.00 persen menggunakan semen/papan/kayu berkualitas rendah/bambu. Dari pantauan lapangan, sebagian besar berlantai semen yang dihaluskan, 14.00 persen menggunakan tegel/keramik/marmer/kayu berkualitas tinggi, dan 12.00 persen tidak ada lantainya, alias tanah. Rumah dengan lantai semen dan tegel banyak dijumpai pada rumah bantuan pascatsunami.

Atap terluas rumah responden hampir seluruhnya menggunakan seng/asbes 97,67 persen, terbanyak seng. Penggunaan seng merupakan kebanyakan warga masyarakat di Pulau Sumatera, sebagian kecil saja 2.17 persen rumah responden berjenis atap beton/genteng/sirap, dan 0.17 persen yang beratap ijuk/rumbia. Sum-

ber utama penerangan rumah responden 96.67 persen menggunakan listrik PLN, 3.00 persen menggunakan listrik non PLN, dan 0.33 persen masih menggunakan lampu minyak. Kondisi ini menunjukkan bahwa keluarga kurang mampu telah dapat menikmati listrik PLN, pemerintah daerah khususnya mensuplai listrik untuk rumah tangga kurang mampu di Kota Banda Aceh. Daya yang mereka gunakan umumnya 450 VA, cukup untuk penerangan dan penggunaan lainnya, seperti TV sebagai sarana informasi dan hiburan, dan penggunaan alat berlistrik lainnya. Responden yang belum menggunakan listrik, disebabkan belum mampu membayar biaya pemasangan listrik dan langganan per bulan, beberapa diputus daya listriknya karena tidak sanggup membayar tagihan lebih dari satu bulan.

Sumber air yang dimanfaatkan responden dan keluarganya untuk kebutuhan sehari-hari terbanyak masih menggunakan sumur 71.17 persen, 27.50 persen menggunakan ledeng dari perusahaan air minum daerah (PAMD), yang instalasinya sudah dilalui pipa PAMD, sumber air yang ada kurang layak untuk dikonsumsi sehingga air ledeng menjadi sumber utama keseharian mereka, lainnya menggunakan air sungai atau meminta air dari sumur tetangga. Air minum agak berbeda dengan air yang digunakan keseharian, air minum yang dimanfaatkan responden cukup variatif, 46.17 persen dari kemasan per galon, 13.00 persen menggunakan ledeng, dan 11.50 persen air sumur, tetapi 29.33 persen menggunakan sumber air minum selain hal di atas, mereka membeli air dengan wadah jerigen dari penjaja air keliling, karena air kurang layak konsumsi dan sumber air PAMD belum ada.

Kepemilikan MCK (mandi cuci kakus) responden di luar 11 kriteria Kepmensos RI), 86.00 persen menyatakan milik sendiri, tidak campur atau bersama-sama tetangga, 12.33 persen bersama, MCK 1.00 persen tidak memiliki, dan 0.6 persen menggunakan MCK umum karena mereka tinggal di daerah padat penduduk yang minim tanah untuk MCK. Kepemilikan aset responden sangat bervariasi dan merupakan barang yang

dapat dinominalkan dengan uang, kepemilikan aset menggambarkan bahwa HP, sepeda motor, lemari es dan TV di atas 21 inchi sudah merupakan kebutuhan primer. HP dimiliki sebagian besar responden, 81.17 persen. Sepeda motor 74.17 persen memilikinya, lemari es lebih dari separuh responden memilikinya, 66.00 persen, TV di atas 21 inc dimiliki 52.67 persen responden. Sebagian kecil saja, masing-masing 10.67 persen dan 9.00 persen, yang memiliki tabungan dan perhiasan emas dan sejenisnya.

Apabila ditilik dari keberadaan tempat tinggal responden, dari keberadaan perumahan responden dan lingkungan tempat tinggal, ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas yang ada, dapat dinilai baik. Persentase kondisi dimaksud sedang 62.33 persen, baik ada 20.17 persen, sedikit rusak atau kurang baik 17.50 persen, terutama kondisi rumah dan jalan menuju ke rumah. Seluruh program layanan sosial pemerintah sudah menjangkau seluruh responden dan keluarganya, seperti program indonesia sehat, program keluarga sejahtera, beras sejahtera (Rastra), program keluarga harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar/BOS. Sebagian kecil lainnya juga sudah tersentuh program Kementerian Sosial RI, selain PKH seperti ASLUT (asuransi lanjut usia terlantar), ASODK (asistensi sosial orang dengan kecacatan), PKSA (program kesejahteraan sosial anak), dan Kube.

Penyakit degeneratif yang ada dalam beberapa keluarga kurang mampu sebagai akibat kepala keluarga tidak mampu memenuhi gizi, nutrisi dan protein serta imunisasi pada anak bayi dan balita, walaupun imunisasi merupakan program nasional yang difasilitasi Kementerian Kesehatan, dampak kurang gizi menyebabkan disabilitas pada anak termasuk penyakit kronis. Dari 600 responden, 66 keluarga kurang mampu memiliki anggota disabilitas (kecacatan), 42.42 persen cacat fisik, 19.70 persen cacat mental, dan cacat ekspsikotik, 9.09 persen cacat mata dan rungu-wicara.

Penyebab kecacatan (disabilitas) pada keluarga kurang mampu ini, penyebabnya beragam

seperti yang tertera pada Tabel 4 di bawah ini. Ada yang merupakan bawaan sejak lahir (30.30 persen), diprediksi karena kurang kemampuan kepala keluarga menjaga kesehatan istri saat kehamilan sampai dengan kelahiran (terutama kekurangan kemampuan ekonomi, yang dapat berpengaruh pada pemenuhan kecukupan gizi, protein, nutrisi dan pemeriksaan rutin kehamilan ke dokter/bidan). Termasuk di dalamnya penyakit kronis (18.18 persen) dengan turunannya. Penyebab kecacatan dapat dilihat pada tabel 4 berikut.

Tabel 4
Penyebab Kecacatan

No	Pendidikan Terakhir	F	%
1	Bawaan sejak lahir	20	30.30
2	Kecelakaan	9	13.64
3	Penyakit kronis (Kusta, TBC, Hipertensi, Jantung, Diabetes, Stroke, dan faktor ketuaan/degeneratif)	12	18.18
4	Keturunan	8	12.12
5	Depresi/stress	8	12.12
6	Umur	2	3.03
7	Lainnya	7	10.61
Jumlah		600	100.00

Sumber: Hasil wawancara (N: 600)

Jenis kecacatan dan penyebabnya tidak lepas dari kemampuan keluarga dalam memenuhi gizi, protein dan nutrisi anggota keluarga, terutama istri (khususnya yang hamil sampai melahirkan), anak batita dan balita. Pengaruh tingkat ekonomi keluarga terlihat signifikan dengan kecacatan (disabilitas), berdasarkan hasil penelitian tentang kesehatan dan yang terkait, termasuk pendapat pakar atau ahli yang terkait. Kecacatan secara tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga, berimplikasi pada pengeluaran, pemenuhan kebutuhan dasar, pengobatan dan perawatan yang mengalami kecacatan.

D. Penutup

Kesimpulan: Berdasarkan uraian analisa dan interpretasi data yang tersaji dapat disimpulkan bahwa Kota Banda Aceh pascatsunami masih terdapat warga masyarakat yang hidup miskin. Keluarga yang memperoleh bantuan perbaikan rumah dari pemerintah, NGO dan masyarakat yang peduli terhadap keluarga korban gempa dan tsunami cukup besar jumlahnya, sehingga khusus untuk kota Banda Aceh kriteria kemiskinan ditinjau dari rumah tidak serta merta dapat dikategorikan kondisi ekonominya, diperlukan pengamatan lapangan untuk dapat menentukan keluarga miskin di daerah ini. Penghasilan kepala keluarga jauh di atas penghasilan keluarga miskin yang ditetapkan pemerintah, Rp 600.000,- per bulan, sebagian besar penghasilan mereka diatas Rp.601.000 sampai Rp.1.800.000,- per bulan. Pengeluaran rumah tangga per bulan relatif sama dengan pengasilan per bulan.

Kepemilikan barang yang dulu merupakan barang sekunder dan tergolong mewah dan mahal, khusus di Kota Banda Aceh barang tersebut sudah merupakan kebutuhan primer yang keseharian diperlukan, seperti HP, sepeda motor, TV diatas 14" dan kulkas, harga dan kondisi barang dimaksud murah karena merupakan barang bekas. Sebagian besar dari mereka juga menggunakan listrik PLN sebagai sarana penerangan dan kegiatan lain. Upaya pemerintah pusat dan daerah meluaskan jangkauan kelistrikan di masyarakat sudah cukup berhasil, dengan sudah digunakannya listrik PLN sebagai penerangan dan kegiatan lain, khususnya pasca tsunami di kota Banda Aceh.

Rekomendasi: aspek atau kriteria kemiskinan yang ada dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri terkait perlu ditinjau kembali dengan kondisi kehidupan masyarakat miskin, khususnya di Kota Banda Aceh. Penghasilan per bulan dan kepemilikan barang yang dulu merupakan kebutuhan sekunder, telah berubah menjadi kebutuhan primer, termasuk penggunaan listrik PLN.

Pustaka Acuan

- Andrea Harsono, (2016), *Pasca 10 Tahun Tsunami, Masyarakat Aceh Kini Berhadapan Dengan Formalisasi Islam*, Voice Of America, Berita/Indonesia.
- Abdul Ghani Salleh, *Perencanaan Kota Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami*, Universiti
- Brithe Mikkelsen, (2001). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Biro Pusat Statistik dan Departemen Sosial RI, (2000). *Analisa data makro penyandang masalah*. Jakarta: BPS.
- BPS (2000). *Kesejahteraan Sosial Hasil Susenas*. Jakarta: Depsos RI.
- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, (2015). *Data PMKS dan PSKS Kota Banda Aceh*.
- Departemen Sosial, (2006). *Pemetaan kemiskinan Kecamatan di Indonesia*. Jakarta: Badiklit Kesos dan Pusdatin Kesos Depsos RI.
- Daud Bahransyaf dkk, (2011). *Pola Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Perkotaan*, Yogyakarta: Kementerian Sosial RI dan Ristek.
- Fajar Weiz, (2016). *Makalah kemiskinan (Sosiologi)*, fajarweiz.blogspot.co.id/2011 diunduh tgl 8-04-2016.
- Gunawan Sumodiningrat, (2005). *Strategi Pembangunan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta.
- Istiana Hermawati dkk, (2015). *Proposal Penelitian Pengkajian Konsep dan Indikator kemiskinan*, Yogyakarta: B2P3KS.
- Rani Virginia Utami, (2014). *Satu Dekade Tsunami Aceh, Pembangunan Aceh hanya Unggul Secara Fisik*, CNN Indonesia. (19.12.2014)
- Sunyoto Usman, (2015). *Tanggapan Pakar terhadap Pengkajian Konsep dan Indikator Kemiskinan Kementerian Sosial RI*. Yogyakarta: tidak dipublikasikan.
- Mubyarto, (2003). *Penanggulangan kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: artikel dalam jurnal
- Munandar.S, (1986). *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung: Eresco.
- Nurina Savitri, (2014). *Satu Dekade Tsunami Pembangunan Ekonomi di Aceh masih Lambat*, Radio Australia (12.12.2014).
- Jawa Post, *Inovasi Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal* (1), 21/03/2015, 04.30 WIB.
- Paulus Wirotomo, (2013). *Konsep Pembangunan Sosial Sudut Pandang Sosiologi*, Paulus Wirotomo.blogspot.co.id (26-10-2013), diunduh 7-04-2016
- Sapariah Saturi(2014), *Melihat Pembangunan Aceh Pasca tsunami*, Desember 28, 2014 Mongabay. Co. Id.
- Teuku Rahmat Danil Cotseurani, *Seharusnya Pemerintah Aceh Terapkan E-Government dan E-Budgeting*, Kompasiana, diunduh 27-4-2016.
- Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial
- Undang-Undang No 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- United Nation, (2001). *World development report 2000-2001: Attacking Poverty*. Washington Dc.
- Voice Of America*, Berita Indonesia, *Pasca 10 tahun Tsunami, Masyarakat Aceh kini Berhadapan dengan Formalisasi Islam*, diunduh 23-03-2016.